



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT KOMISI IX DPR RI
(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN,
BNP2TKI, BADAN POM, BKKBN, BPJS KESEHATAN, DAN
BPJS KETENAGAKERJAAN)**

Tahun Sidang	: 2014-2015
Masa Persidangan	: II
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri Ketenagakerjaan RI
Acara	: Pembicaraan Pendahuluan Program/ Kegiatan Kementerian Ketenagakerjaan pada RAPBN-P Tahun 2015
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Selasa, 3 Februari 2015
Pukul	: 14.00 WIB – selesai
Ketua Rapat	: H. Syamsul Bachri S,M.Sc/ Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	: Muhammad Yus Iqbal, SE/ Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR-RI Lantai I Gedung Nusantara I Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Hadir	: A. Anggota Komisi IX DPR RI orang dari 44 orang Anggota Komisi IX DPR RI B. Menteri Ketenagakerjaan RI beserta jajaran.

PIMPINAN KOMISI IX DPR RI :

1. Dede Yusuf Macan effendi, S.T, M.I.Pol (F-PD)
2. H. Syamsul Bachri, M.Sc (F-PG)
3. Pius Lustrilanang, S.IP, M.Si (F-P.Gerindra)
4. H. Asman Abnur, SE.,M.Si (F-PAN)
5. Dra. Ermalena, MHS (F.PPP)

F.PDIP :

6. Alex Indra Lukman
7. Hj. Elva Hartati, S.IP, MM
8. Ir, Ketut Sustiawan
9. dr. Ribka Tjiptaning
10. H. Imam Suroso, S.Sos, SH, MM
11. Nursuhud
12. Abidin Fikri, SH
13. Dr. Karolin Margret Natasa

F.PG :

14. Hj. Saniatul Lativa, SE
15. Hj. Dewi Asmara, SH, MH.
16. dr. Charles J. Mesang
17. Aditya Anugrah Moha, S.Ked
18. drg. Hj. Andi Fauziah Pujawatie Hatta, SKG

F.P.GERINDRA :

19. Khaidir
20. dr. H. Suir Syam, M.Kes
21. Susi Syahdonna Bachsin, SE, MM.
22. drg. Putih Sari
23. Roberth Rouw.

F.PD :

24. Drs. H. Zulfikar Achmad
25. Siti Mufattahah, Psi.
26. Drs. Ayub Khan.
27. dr. Verna Gladies Merry Inkiriwang
28. Hj. Aliyah Mustika Ilham, SE.

F.PAN :

29. Ir. H.A. Riski Sadig
30. Dr. H.M. Ali Taher Parasong, SH, M.Hum
31. Hang Ali Saputra Syah Pahan, SH

F.PKB :

32. H. Marwan Dasopang
33. H. Handayani, SKM
34. Hj. Nihayatul Wafiroh, MA
35. Dra. Hj. Siti Masrifah, MA

F.PKS :

36. Ansory Siregar, Lc
37. Drs, H. Chairul Anwar, Apt
38. Drs. H. Hamid Noor Yasin, MM

F.PPP :

39. Dra. Hj. Okky Asokawati, M.Si.
40. Drs. H. Irgan Chairul Mahfiz, M.Si.

F.P.NASDEM :

41. Irma Suryani Chaniago, SE
42. Ir. Ali Mahir, MM
43. Amelia Anggraini

F.P. HANURA :

44. Capt. Djoni Rolindrawan, SE.,M.MAR, MBA

UNDANGAN :

1. **M. Hanif Dhakiri** (Menteri Ketenagakerjaan RI) beserta jajaran

KETUA RAPAT :

KASET 1 TIDAK BISA DI-REWIND / KASET RUSAK

.....Acara kita hari ini acara tunggal yaitu membahas RAPBNP Tahun 2015 dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati.

Sesuai dengan laporan dari Sekretariat Jenderal pada saat ini sudah ditandatangani atau telah hadir 25 anggota dari 48 dan dari 10 fraksi, artinya dihadiri oleh seluruh fraksi. Oleh karena itu dengan membaca *Bismillahirrahmaanirrahiim* Rapat Kerja antara Komisi IX DPR RI dengan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PKL 14.35 WIB)

Bapak dan ibu sekalian yang saya hormati.

Acara kita seperti ...

KASET 2

MENAKER RI :

Dan dari sekitar 50.000 yang kita kirim kesana itu begitu pulang sekarang masih tersisa 2.500 an di Jepang. Setelah pulang itu 85% mereka menjadi wirausahawan ada yang karyawannya 5,ada yang 10 bahkan ada yang karyawannya 500 sampai 1.000. Jadi artinya skema ini karena memang basisnya adalah *skill labour* sehingga mereka ini hanya butuh waktu 3 tahun disana, tetapi begitu pulang mereka bisa bikin wirausaha, mereka bisa melakukan perluasan kesempatan kerja, menyediakan lapangan kerja buat orang lain dan hampir tidak ada resiko karena jumlah kasus yang muncul disana itu kecil sekali. Nah itulah mengapa hampir orang nggak pernah dengar kasus yang istilahnya TKI kita di Jepang.

Nah ini pemagangan mau terus kita tingkatkan juga, termasuk nanti dalam rangka mendorong kedepan, ini dalam rangka mendorong agar penempatan keluar negeri itu lebih berbasis kepada yang formal yang skill, terus terang kalau yang informal ini resikonya lebih besar terutama di negara-negara yang sistem hukum maupun *culture*-nya ini tidak cukup suportif terhadap eksistensi dari pekerja di sektor domestik.

Nah sehingga kedepan kami juga sudah merencanakan untuk beberapa kunjungan keluar negeri nantinya, kami bukan hanya sekedar akan bertemu dengan Menteri Perburuhan atau mungkin Menteri Tenaga kerja diluar negeri tetapi juga bertemu dengan chamber of commerce di luar negeri sehingga kita bisa meletakkan peluang kerja disektor formal.

Dukungan manajemen dan tugas teknis ini lazim saja.Lalu peningkatan kompetensi instruktur dan tenaga kepelatihan , nah ini masih terus kita lakukan. Peningkatan penyelenggaraan pemagangan dalam

dan luar negeri yang barusan saya singgung. Pengembangan dan peningkatan produktifitas, pengembangan standarisasi kompetensi kerja dan program pelatihan Binalattas ini kaitannya dengan kelembagaan dari lembaga-lembaga pelatihan kerja.

Untuk di Binapenta Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, ada sejumlah program yang pertama pengembangan model dan inkubasi bisnis perluasan kesempatan kerja. Kemudian yang kedua penempatan tenaga kerja dalam negeri, nah penempatan tenaga kerja dalam negeri ini salah satu yang akan kita maksimalkan nanti di bursa kerja informal. Nah saya sering contohkan yang sederhana saya ini punya banyak teman termasuk Anggota DPR yang selalu pusing untuk nyari supir, nah tapi ketika kita ke daerah nanya orang yang bisa nyupir itu banyak, jadi di Jakarta orang kesulitan cari supir tapi begitu kita ke Cirebon banyak orang nyupir tidak bisa mendapatkan pekerjaan, nah inikan nggak nyambung ini. Nah kalau selama ini bursa kerja yang formal kita itu sudah menjembatani kebutuhan industri, industri butuh apa, pabrik butuh apa itu penyiapan tenaga kerjanya bisa nyambung. Nah tapi yang informal seperti ini yang sedang kita maksimalkan bursa kerja, khususnya yang terkait dengan informal ini sehingga titik temu antara para pencari kerja dengan pemberi kerja itu bisa lebih diintensifkan. Kemudian pembinaan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, pengembangan dan peningkatan perluasan kesempatan kerja, peningkatan pengembangan pasar kerja, peningkatan pengendalian penggunaan tenaga kerja asing. Nah ini pengendalian, ketika kita ini membuat PTSP yang tempo hari diresmikan oleh Bapak Presiden Pelayanan Terpadu Satu Pintu, kami sudah berkoordinasi dengan BKPM karena sejumlah kewenangan dari Kementerian Ketenagakerjaan itu kita delegasikan kepada Kepala BKPM terkait dengan ijin-ijin. Nah khusus untuk tenaga kerja asing ini kita minta betul agar tenaga kerja asing ini tidak diletakkan dalam konteks pelayanan melainkan pengendalian karena itu beda, kalau pelayanan pasti semua harus dipermudah tapi kalau pengendalian harus ada sistem kontrol kita terhadap keberadaan tenaga kerja asing di Indonesia. Ini mengingat bahwa satu, kita memerlukan kebijakan yang bersifat resiprokal dari negara-negara lain, karena negara lain juga menerapkan hal yang sama. Terus kemudian yang kedua ini juga dalam rangka untuk memastikan agar sektor tenaga kerja di Indonesia ini bisa dilindungi secara baik oleh negara.

Program berikutnya yang ketujuh adalah dukungan manajemen dan teknis untuk di Direktorat Jenderal Binapenta. Untuk di PHI (Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja), yang pertama programnya pengelolaan kelembagaan dan pemasyarakatan hubungan industrial, terus kemudian kedua peningkatan penerapan pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja. Jadi isi-isinya paling nggak lari jauh dari situ. Konsolidasi pelaksanaan peningkatan intensitas pencegahan PHK dan penyelesaian hubungan industrial ini karena ... cukup banyak. Pengelolaan persyaratan kerja, kesejahteraan dan analisis diskriminasi. Yang kelima penyempurnaan peraturan Ketenagakerjaan dan regulasi yang terkait termasuk harmonisasi, regulasi yang selama ini masih menghadapi sejumlah masalah seperti harmonisasi, regulasi terkait

dengan isu outsourcing misalnya, yang berikutnya dukungan manajemen dan tugas teknis lain.

Untuk dipengawasan ketenagakerjaan ada 6 program, peningkatan kualitas teknis pemeriksaan dan penyidikan norma ketenagakerjaan, ini untuk mengoptimalkan pengawasan dan pemeriksaan kita kaitannya dengan pelaksanaan norma-norma ketenagakerjaan. Yang kedua peningkatan perlindungan pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak, kita ini sudah buat programnya bekerjasama dengan ILO untuk program penghapusan pekerja anak dan juga perlindungan terhadap pekerja perempuan. Yang ketiga peningkatan penerapan norma keselamatan dan kesehatan kerja, norma keselamatan dan kesehatan kerja ini selama ini belum terlalu menjadi primadona, oleh karena itu kita mendorong ini kedepan juga bisa menjadi primadona karena ini salah satu kunci juga untuk masukan agar hak-hak dari para pekerja ini terlindungi dan keselamatan dan kesejahteraan mereka benar-benar dijamin didalam lingkungan pekerjaan. Yang keempat peningkatan penerapan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja, nah semua hal yang terkait dengan regulasi yang merupakan turunan dari Undang-undang terkait ini semuanya sudah dipersiapkan dan sekarang dalam tahap harmonisasi. Yang kelima peningkatan kualitas dan pengelolaan keselamatan dan kesejahteraan kerja, dan yang berikutnya soal manajemen.

Bapak, Ibu dan Hadirin sekalian.

Itu sejumlah capaian program dan kegiatan untuk tahun 2015. Nah yang terakhir ijin saya untuk menyampaikan postur anggarannya, ini halaman 24. Postur anggaran dari Kementerian Tenaga Kerja, ini sesuai dengan surat Menteri Keuangan tanggal 24 September 2014, total anggaran Kemenakertrans itu 5,2 triliun sekian. Nah 5,2 triliun itu masih ada transnya, nah begitu dihilangkan transnya menjadi pagu khusus untuk Kementerian Ketenagakerjaan jumlahnya 4,223 triliun.

Halaman berikut, nah ini penyesuaian alokasi anggaran dari Kementerian Ketenagakerjaan. Ini alokasi awal dari anggaran kita ini 3,823 triliun terus kemudian ada penyesuaian kemudian menjadi berkurang 3,718. Nah kenapa berkurang itu untuk di Setjen itu berkurang 202 miliar karena ini harus lari ke trans, ini judulnya pokoknya belah duren, jadi yang ke-trans langsung dikasih ke trans 202. Kemudian kalau di Inspektorat Jenderal nggak ada, di Barinbang karena ada fungsi transmigrasi disitu itu 21 miliar melayang ke transmigrasi berarti gabung ke Pak Marwan Jafar. Di Binalattas itu karena juga ada Balatrans maka ada sekitar 73 miliar ini yang ikut kesana terus kemudian di Binwas Naker dan K3 juga ada, oh sorry ini malah penambahan ini, ini penggabungan. Ini kalau yang 191 ini dari pagu awal 498 menjadi 690 karena K3 yang tadinya di Sekjen kemudian digabung sesuai dengan nomenklatur dan struktur organisasi yang baru itu di Ditjen Binwas Naker. Jadi jumlah secara dari alokasi penyesuaian anggaran ini menjadi 3,7.

Bapak dan ibu sekalian yang saya hormati.

Dihalaman 28 ini yang terakhir dari alokasi anggaran kaitannya dengan tambahan anggaran untuk Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi dari total yang tadi 3,718 akhirnya kita mendapatkan tambahan 505 miliar, nah 505 miliar itu 285 miliarnya di Dirjen Binalattas ini kaitannya dengan sertifikasi tenaga kerja dan juga soal revitalisasi BLK sama tenaga kerja, terus kemudian di Direktorat Jenderal Bina PMK ini ada 220 miliar ini yang terkait dengan upaya kita untuk memberikan *treatment* bagi korban PHK, bagi Purna TKI, terus nelayan dan juga orang tua pekerja anak jadi ini intinya adalah untuk tenaga kerja rentan kurang lebih begitu. Jadi totalnya menjadi 4,223 triliun.

Demikian Pak Ketua, Pimpinan dan Bapak Ibu Anggota Komisi IX yang saya hormati. Jadi secara keseluruhan bahwa untuk anggaran tambahan pada tahun ini Depnaker mendapatkan waktu sekitar 505 miliar dan secara total menjadi 4,2 triliun. Nah kami masih terus memantapkan rencana strategis kita sampai dengan tahun ini dan juga *roadmap* kita untuk 2019 yang sebenarnya kalau dilihat dari kebutuhannya pasti akan sangat besar. Tapi pada kesempatan kali ini kami terus terang belum mencabut untuk itu karena kami masih belum melakukan pematangan terhadap rencana kerja itu sehingga pada tahun-tahun yang akan datang mungkin itu bisa lebih kita kuatkan sambil kami secara organisasi memantapkan dari seluruh jajaran kami di Kementerian Tenaga Kerja untuk bisa berlari lebih cepat dan dengan anggaran yang lebih banyak kurang lebih begitu.

Demikian, mohon bantuan dan dukungan dari segenap anggota Komisi IX yang terhormat untuk berkenan memberikan persetujuan atas anggaran dari Kementerian Tenaga Kerja Perubahan ini ditahun 2015.

Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya.

Wallahul muwaffiq ila aqwamit-tharieq.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Pak Menteri yang telah menjelaskan kepada Komisi perubahan anggaran termasuk tambahan anggaran yang diperoleh sebesar Rp. 505 miliar. Tadi Pak Menteri menyampaikan bahwa Rp. 505 miliar itu terutama ditujukan kepada tenaga kerja rentan dan sebagainya.

Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati.

Sampai sekarang cuma 3 orang yang bertanya, ini mungkin menunjukkan bahwa perdebatan panjang lebar minggu lalu sudah cukup mengakomodasi aspirasi yang berkembang sehingga pada hari ini tidak terlalu banyak lagi pertanyaan. Tentu harapan dari Komisi IX adalah

bagaimana kesimpulan yang kita ambil beberapa waktu yang lalu bisa diterjemahkan lebih lanjut pada waktu-waktu yang akan datang. Syukur-syukur ada yang bisa di-insert masuk dalam APBNP perubahan ini.

Saya persilakan saja kepada Anggota yang akan bertanya, yang pertama dari sebelah kanan yang terhormat ibu Okky Asokawati.

F-PP (Dra. HJ. OKKY ASOKAWATI, M.Si) :

Terima kasih Pimpinan.

**Pimpinan dan Anggota Komisi IX yang saya hormati.
Bapak Menaker beserta jajarannya yang saya hormati.**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Tidak banyak yang hendak saya soroti pak, terima kasih untuk presentasinya. Saya tertarik dengan saya Nawa Kerja Ketenagakerjaan dari Kemenakertrans. Yang ingin saya tanyakan ini mungkin tidak ada kaitannya dengan anggaran hanya sekedar wacananya saja, yang ketiga adalah percepatan sertifikasi profesi. Pertanyaan saya bagaimana dengan tenaga kerja asing ini terkait dengan Mea nanti. Apakah tenaga kerja asing itu untuk mereka bisa bekerja disini mereka juga akan mendapatkan sertifikasi juga dan bagaimana upaya bapak untuk melindungi tenaga kerja lokal.

Itu saja, terima kasih.

Billahittaufiq walhidayah.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Selanjutnya yang terhormat Bapak Hamid silakan.

F-PKS (Drs. HAMID NOOR YASIN, MM) :

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua.

**Yang kami hormati Pimpinan dan seluruh anggota Komisi IX.
Yang kami hormati Pak Menteri dan seluruh jajarannya.**

Pertama, kami memberikan apresiasi dengan bertambahnya anggaran yang Rp.505 miliar meskipun kalau kita lihat beban kerja dan target yang akan dicapai penambahan itu masih kurang sebetulnya sehingga kalau bisa ditambah lagi tentu akan lebih mudah untuk

menyelesaikan beberapa persoalan-persoalan yang menjadi target capaian di Kementerian Tenaga Kerja.

Saya sedikit mengulas dari yang disampaikan Pak Menteri yang terakhir, yakni penambahan di Ditjen Binallatas Rp. 285 miliar dan Ditjen Bina PMK Rp.220 miliar tidak terlihat detail anggaran dan penambahan target kinerjanya. Jadi yang pertama, perlu dijelaskan dulu detail rencana kegiatan dan anggaran di Kemenaker termasuk target kinerjanya.

Kemudian yang kedua secara khusus terkait pengentasan tenaga kerja anak perlu ditingkatkan target kinerjanya dan ditambah anggaran minimal 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Meskipun kemarin kita perlu memberikan apresiasi juga bahwa tahun 2014 Kemenaker berhasil mencapai target 100% berupa penarikan tenaga kerja anak sebanyak 15.000 jiwa dari tempat kerja dan dikembalikan ke dunia pendidikan.

Kemudian yang ketiga, banyak BLK di daerah yang kondisinya sangat memprihatinkan dan tidak optimal dalam menambah tenaga terampil. Nah ini bagaimana rencana Kemenaker dalam menguatkan BLK di daerah sehingga bisa sekuualitas yang ada di pusat, karena persoalan-persoalan pengangguran di daerah ini masih sangat banyak sekali dan APBD di kabupaten-kabupaten masih belum mampu menjangkau secara keseluruhan terhadap persoalan-persoalan tenaga kerja di daerah.

Kemudian yang keempat kami mengusulkan kegiatan penyempurnaan peraturan Ketenagakerjaan ditambah dari si target kinerja dan jumlah anggaran di Ditjen PHI dan Jamsos. Tertulis hanya 1 output-nya Pak Menteri. Kali ini karena ada beberapa peraturan yang perlu dievaluasi diganti seperti aturan tentang pengupahan dan perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan.

Kemudian yang terakhir Pak Menteri karena seperti yang pernah kita sampaikan kemarin bahwa Komisi IX ini adalah komisi air mata, tempatnya pengaduan dari para orang-orang yang menderita. Beberapa hari yang lalu kita mendapatkan pengaduan dari kawan-kawan pekerja di Merpati Nusantara yang jumlahnya kurang lebih sekitar 1.400 itu sampai sekarang tidak ada kejelasannya. Kalau kita kalikan 4 orang per kepala keluarga itu istri dan dua anaknya berarti sudah ada sekitar 5.600 nyawa yang ada disitu. Oleh karena itu kami minta kepada Pak Menteri dan mungkin ini menjadi tanggung jawab kita bersama Komisi IX dan juga ini mungkin menyangkut juga komisi yang terkait dengan BUMN Komisi VI kalau nggak salah, ini perlu mendapatkan perhatian secara serius karena ini menyangkut nyawa manusia.

Saya rasa itu Pak Pimpinan, terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Hamid.

Selanjutnya yang terhormat Pak Imam Suroso kami persilakan.

F-PDIP (Drs. H. IMAM SUROSO, MM) :

Terima kasih pimpinan.

**Yang saya hormati Pimpinan dan teman-teman Komisi IX.
Yang saya hormati Pak Menteri Tenaga Kerja dan jajarannya.**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Terima kasih atas paparannya Pak Menteri yang singkat padat, kata pimpinan tadi ... karena semua sudah berjalan dengan baik.

Pak Menteri.

Jadi menurut saya kalau hanya anggaran lima ratus setengah triliun lah bagi kami ini memang kurang karena mengingat lapangan pekerjaan yang begitu nggak jelas, banyak pengangguran tadi Pak Menteri juga bilang lulusan SMP luar biasa, itukan SDM rendah. Menurut kami itu teman-teman memperjuangkan, kalau perlu ditambah malah.

Kemudian yang kedua Pak Menteri, saya hanya menanyakan pagu anggarannya itukan Rp. 4,223 triliun data kami pada tahun anggaran 2014 Ditjen Binwas Naker hanya mampu menyerap anggaran sekitar Rp. 71,3%. Jadi penyerapan anggaran tersebut itu menurut saya rendah dari anggaran. Kemudian nanti mohon dijelaskan apa yang menjadi hambatan dari minimnya penyerapan anggaran tersebut. Kemudian yang kedua program-program apa yang telah direncanakan Binwas Naker pada tahun 2015 ini yang langsung dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Kemudian dari anggaran Rp. 4,2 triliun 2014 kemarin yang akan dioperasionalkan 2015 ini adakah Pak Menteri program-program kerakyatan, perlu diketahui bahwa Komisi IX adalah komisi kerakyatan maka mitra kerjanya Kementerian Tenaga Kerja, Menkes, BPJS itu untuk rakyat. Artinya Pak Menteri bahwa dari Kementerian Tenaga Kerja itu harus sering turun kebawah, keujung-ujung pelosok untuk apa? Untuk sosialisasi tentang keberadaan Kemenaker. Nah nanti mohon dijelaskan adakah program-program untuk ke daerah ke Dapil, ada apa tidak? kemudian ada apa tidak melibatkan yang punya Dapil itu, Komisi IX inikan yang punya Dapil ngerti persis, ini orang bodoh, ini ijasahnya nggak jelas, ini dibohongi orang bahwa keluar negeri tapi jadi kasus dan masalah, pembunuhan juga dan seterusnya. Ini perlu turun, menurut saya Pak Menteri dengan turunnya Kementerian Tenaga kerja mesti kan minta bantuan ke dinas-dinas itu, ke Dinas Provinsi maupun Dinas Kabupaten. Nah disitu dilibatkan anggota Komisi IX, itu bagus karena sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan itu sangat penting dan saya yakin kalau turun itu teman-teman mesti ada media, dengan adanya media di-*on air* kan jelas ini loh kerjanya Menteri Tenaga Kerja, kerja kerja sesuai Jokowi juga masuk, DPR nya juga sama ya sama-sama dapat nama, rakyatnya itu dapat nama rakyatnya nggak tahu jadi ngerti.

Jadi mohon nanti dijelaskan dan untuk APBNP ini menurut saya kalau belum ada dianggarkan atau diprogramkan harus ada, jadi hukumnya wajib karena programnya Jokowi itu dari rakyat untuk rakyat, kerja kerja dan kerja, *grass road* turun kebawah. Nah ini Pak Menteri perlu dialami seperti itu.

Tadi saya setuju dengan Pak Menteri bahwa di Jepang ada instruktur, orang berapa? 2500, terus pulang, bisa punya karyawan 100, bisa punya karyawan ribuan itu saya sangat tertarik. Nah sistem itu seperti apa? Nah kalau perlu itu bisa kita sosialisasikan, ya biar semuanya bisa seperti itu. Karena orang-orang kita ini banyak nganggur, kalau nganggur banyak itu menjadi kasus polisi kaitannya ... Makanya disini Pak Menteri yang namanya Balai Latihan Kerja itu hukumnya wajib untuk dihidupkan. Bupti-Bupati yang nggak jelas itu anggarannya yang harusnya untuk Balai Latihan Kerja digunakan yang lain itu nggak jelas juga, itu kalau perlu Pak Menteri harus mensosialisasikan, mensinergikan itu harus, apapun bentuknya kalau remaja-remaja kita punya keterampilan itu hebat, mau didalam negeri juga hebat misalnya mau jahit, banyak sekali. Apalagi dia dikirim keluar negeri punya terampil, inilah pentingnya jadi kita sering menyampaikan.

Jadi Pak Menteri mohon itu disinkronisasikan, diklopkan kalau perlu BNP2TKI juga main pula sama manajer. Jadi kami selaku Anggota DPR akan memantau, akan mengawal kalau memang perlu dengan Kementerian yang lain, perlu dengan komisi yang lain, teman-teman Komisi III siap rapat gabungan, kalau perlu dengan Menteri Keuangan nggak ada urusan, kalau ini untuk rakyat nggak ada urusan, pasti *clear*.

Sekian, terima kasih Pak Menteri.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Imam.
Selanjutnya yang terhormat Pak Budi Supriyanto.

F-PG (BUDI SUPRIYANTO, S.H., M.H.) :

Terima kasih Pimpinan.

Pimpinan dan Rekan-rekan Anggota Dewan yang terhormat serta Pak Menteri dan jajarannya.

Setelah saya membaca paparan dari Pak Menteri ini secara global telah disampaikan dan barangkali soal anggaran ini adalah anggaran yang telah kita setuju pada APBN lalu. Jadi disini nampak bahwa tidak mengajukan penambahan anggaran apapun, yang saya baca begitu. Penjelasan secara global sudah cukup bagi kami, jadi tadi saya pikir rapat kita tutup saja pimpinan, lebih baik kita dalam per Eselon I. Jadi kalau tadi Pak Imam tanya kok kenapa program KB nggak ada, memang disini nggak dijelaskan, nanti lebih baik kita dalam dengan Eselon I, ini

RDP kita pembukaan oleh Pak Menteri kita tunda dan kita dalam dengan Eselon I.

Terima kasih Pimpinan, kita teruskan pun nanti arahnya juga nggak jelas. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Budi.
Selanjutnya yang terhormat Ibu Amelia.

F-P.NASDEM (AMELIA ANGGRAINI) :

Terima kasih pimpinan.

**Pimpinan dan rekan-rekan Anggota Komisi IX yang saya hormati.
Pak Menteri Ketenagakerjaan dan jajarannya yang saya hormati.**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Tadi sudah disampaikan oleh Pak Budi nanti dibicarakan terpisah, tapi karena sudah mendapat giliran saya ingin menyampaikan. Pak Menteri, mengingat kesimpulan Rapat Kerja Komisi IX DPR RI yang lalu dengan Pak Menteri dan jajarannya pada tanggal 22 Januari 2015 yang lalu pada poin tiga mendesak Kementerian memperluas dan mengoptimalkan BLK dan BLKM di tiap kabupaten kota yang disinkronkan dengan program pemerintah daerah. Selanjutnya di poin enam juga meminta kepada Kemenaker untuk menyampaikan data jumlah BLK dan BLKM serta kondisinya diseluruh Indonesia.

Saya ingin men- *share* informasi terkait dengan BLK di Dapil saya Kabupaten Purbalingga adalah salah satu kabupaten yang menjadi sentra industri rambut, industri knalpot dan kemudian juga ada bulu mata dan aksesoris yang kualitasnya dapat berkompetisi dengan produk kelas dunia lainnya.

Nah saya ingin menyoroti perbandingan postur anggaran masing-masing di Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktifitas total anggarannya adalah Rp. 1,6 triliun dan ini adalah Dirjen anggaran yang paling besar anggarannya dengan 16 poin program. Saya sepakat dengan keberpihakan anggaran yang dibesarkan Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktifitas asalkan sungguh targetnya terpenuhi dan tidak salah sasaran. Dan saya berharap Bapak Menteri memperhatikan BLK di Kabupaten Purbalingga karena disisi lain Purbalingga adalah tadi seperti saya sebutkan salah satu kabupaten yang menjadi sentra industri namun BLK nya masih minim peralatan dan ketersediaan instruktur dimasing-masing bidang keterampilan.

Itu saja, sekali lagi pada dasarnya saya sepakat untuk pos ini sepanjang 16 item program tersebut tadi tepat sarannya. Demikian.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Selanjutnya yang terhormat Pak Djoni Rolindrawan.

F-P.HANURA (CAPT. H. DJONI ROLINDRAWAN, SE, MMAR, MBA) :

Terima kasih Pimpinan.

**Yang saya hormati Pimpinan dan rekan Anggota Komisi IX.
Saudara Menteri Ketenagakerjaan dan jajarannya.**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Pada anggaran berdasarkan fungsi, fungsi ekonomi itu terdapat perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan Ketenagakerjaan. Kita juga ada BNP2TKI, apakah ini perlindungan tenaga kerja hanya yang didalam negeri saja atau juga termasuk yang diluar negeri. Dalam beberapa hari terakhir ini, ada keluhan dari daerah konsituen dari Cianjur ada seorang mungkin banyak, tapi seorang tenaga kerja yang sudah 12 tahun menurut keterangannya itu tidak digaji terus juga tidak bisa pulang dan dokumennya juga ditahan oleh majikannya. Nah waktu hari minggu lalu saya sempat berkomunikasi dengan Kepala BNP2TKI kemudian mengirimkan juga nota kelihatannya ke Riyadh untuk diusut, saya lihat juga ada balasannya dari atase Ketenagakerjaan Riyadh kepada Saudara Menteri juga tetapi sampai sekarang itu masih belum jelas, namanya itu Ela Nurlela. Nah ini apakah perlindungan tenaga kerja yang dianggarkan disini itu sudah termasuk misalnya untuk katakanlah melindungi tenaga kerja migran seperti itu. Yang kedua apabila nanti APBNP ini disahkan disetujui mohon kiranya pelaksanaannya juga dilaksanakan sesuai dengan APBNP ini, karena menurut catatan kami disini temuan dari BPK sejak 2008 hingga 2013 itu masih lebih WDP ya hasil auditnya, kemudian juga ada beberapa banyak catatan dan mudah-mudahan kedepannya bisa mendapat wajar tanpa pengecualian, itu harapan kami.

Saya kira itu Pimpinan yang dapat saya sampaikan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Selanjutnya yang terhormat Bapak Charles Mesang.

F-PG (Dr. CHARLES J. MESANG) :

Terima kasih pimpinan.

**Teman-teman Anggota Komisi IX yang saya hormati.
Pak Menteri beserta jajarannya yang saya hormati.**

Melihat pemaparan bapak tentang APBNP 2015 kami lihat ada 2 poin yang bapak ungkapkan pertama yaitu tentang keinginan daripada Presiden dan kedua perencanaan daripada Departemen Tenaga Kerja. Setahu kami anggaran ini masih tambah satu lagi pak, yaitu aspirasi dari kami teman-teman anggota Komisi IX sebab alangkah janggal kalau setiap Reses kami pulang lalu tidak ada ditanya tidak ada yang kami perjuangkan ditingkat pusatnya padahal kita membicarakan tentang anggaran. Kita disumpah untuk memperjuangkan aspirasi daerah yang kita pilih.

Nah melalui forum yang terhormat ini saya harapkan agar didalam pemaparan anggaran tadi mungkin disempurnakan dalam arti ada aspirasi daripada anggota –anggota di Dapilnya yang tentu sesuai dengan perencanaan dari Departemen Tenaga Kerja. Mungkin itu saja usul, bukan pertanyaan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Charles.

Selanjutnya yang terhormat Teuku Khaidir.

F-P.GERINDRA (Tgk. KHAIDIR) :

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Yang kami hormati Pimpinan dan rekan-rekan Komisi IX.
Yang berbahagia dan kami hormati Bapak Menteri beserta seluruh jajaran.**

Dari pertemuan kita yang kedua ini kami menelaah dan membaca apa yang sudah bapak sampaikan tadi berkenaan dengan Pembinaan Pelatihan dan Produktifitas. Nah dalam hal ini di Indonesia saya kira beda-beda daerah beda-beda pula potensi pekerjaan yang ada. Nah terutama di Pulau kita banyak melihat peluang kerja dibidang industri dan wirausaha pendukung industri besar. Nah dalam hal ini kami ingin menyampaikan pembukaan pelatihan itu disetiap daerah itu disesuaikan dengan potensi pekerjaan yang ada di daerah masing-masing, apakah itu berupa pertanian, apakah juga pertanian terpadu, atau perikanan dan peternakan. Maka saya kira kekuatan ekonomi yang ada di kita ini kalau memang kita mau jujur bahwa sesungguhnya kemampuan ekonomi kita itu lebih fokus dan lebih mapan kalau memang agrobisnisnya yang kita kedepankan.

Maka dengan demikian Pak Menteri yang terhormat beserta segenap Dirjen yang hadir, kedepan kita tidak ingin pola kerja di Depnaker itu atau di Menaker itu copy paste dengan kegiatan-kegiatan

rutin tiap tahun pak. Jadi kita ingin ada terobosan-terobosan yang baru yang ini mungkin bisa langsung dirasakan oleh masyarakat di daerah pemilihan kami masing-masing.

Demikian pimpinan itu menjadi harapan kita, mudah-mudahan kedepan bukan hanya otomotif, bukan hanya carpenter atau welder tapi juga ada yang berhubungan dengan pertanian dan perikanan.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Khaidir.
Selanjutnya Pak Ali Taher.

F-PAN (M. ALI TAHER) :

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Saudara Pimpinan, Pak Menteri dan para hadirin yang kami hormati.

Nama Saya Mohammad Ali Taher Parasong, Dapil Banten III kota Tangerang, Tangerang Selatan Kabupaten Tangerang dan asli Nusa Tenggara Timur.

Saudara-saudara sekalian.

Saya rasa terima kasih atas presentasi anggaran dari Pak Menteri dan ada harapan pertama agar penerapan anggaran ini mengikuti norma-norma keuangan yang ada supaya prestasi Kemenaker dari waktu ke waktu lebih baik daripada hari kemarin. Norma anggaran ini penting agar niat yang baik caranya tidak baik itu juga bisa menimbulkan persoalan. Nah oleh karena itu prinsip kehati-hatian menjadi sangat penting.

Kedua, saya tidak melihat ada progresifitas anggaran. Anggaran dari pertemuan kita semula itu 4,2 sekarang menjadi 5,3 itu, oh tetap tidak ada perubahan, saya melihat ini tidak terjadi progresifitas antara ... antara cita, pencitraan, kinerja, semangat yang dibangun oleh Pak Menteri yang begitu bagus itu kelihatan agak jomplang, nanti kelihatan di anggaran. Mungkin ini prinsip kehati-hatian tetapi mungkin kita juga baru tahun pertama. Saya melihat inovasi dalam pelaksanaan akan agak menimbulkan persoalan-persoalan karena beban kerja cakupan begitu luas sementara anggaran sangat sempit ini juga merupakan sesuatu yang perlu kita cermati. Jadi oleh karena itu faktor progresifitas menjadi tidak kelihatan.

Saya ingin tanya dulu, apakah kita sudah pernah lapor keuangan WTP? Belum pernah? Belum? Kita bercita-cita berazam agar periode Pak Menteri ini usahakanlah WTP lah, semangat ini harus kita tumbuhkan

bersama-sama supaya bahwa WTP itu indikator kinerja yang paling bisa diukur. Nah oleh karena itu bagaimana dari Komisi IX mendorong agar Pak Menteri dan jajarannya supaya dari waktu ke waktu meningkat dari WDP menjadi WTP, mudah-mudahan.

Kemudian yang kedua BLK, saya mudah-mudahan data saya tidak terlalu jauh. Program kita kan kemaritiman untuk Pak Jokowi sekarang, bagaimana Pak Menteri merespon ini BLK-BLK di pesisir. Dari total 3.700.000 lebih kapal kita itu banyak menyangkut aspek nelayan dan itu mereka perlu BLK motornya, Yamaha segala macam, saya ini orang pulau pak, ini BLK yang dibangun disana tidak cocok dengan lingkungannya, orang ke pulau nggak dikasih kok BLK yang lain.

Nah jadi Pak Ustadz Teuku Khaidir tadi sudah menyatakan itu betul itu, jadi kalau daerah kepulauan, mungkin yang lebih cocok itu adalah untuk perbaikan motor dan lain sebagainya karena tingkat frekuensi yang begitu besar. Di kampung saya itu begitu banyak kapal motor baru tiga bulan dipakai nggak bisa memperbaiki, akhirnya beli lagi yang baru, yang untung adalah pengusaha. Nah ini perlu dipertimbangkan betul. Oleh karena itu sasaran disamping buruh tadi juga adalah buruh tani nelayan, aspek-aspek itu bagaimana kita bisa mendorong supaya terjadi peningkatan kualitas yang baik.

Saya kira tadi Pak Charles sudah menyampaikan aspirasi Dapil, saya kebetulan Banten itu daerah industri kabupaten Tangerang daerah industri, disamping ada buruh, ada tani dan ada juga nelayan. Nah, ya aspirasinya sudah bersama-sama. Mudah-mudahan ini Pak Menteri bisa memahami, Pak Menteri juga politisi, nah sekarang jadi menteri paham betul apa yang saya maksud itu. Jadi memang kalau sudah pesan teh manis itu jangan tanya gulanya, sudah pasti manis.

Terima kasih Pak Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Ali.

Terakhir dari meja pimpinan yang terhormat Bapak Dede Yusuf Macam Effendi.

F-PD (DEDE YUSUF M.E., ST, M.I.Pol) :

Terima kasih pimpinan.

Pak Menteri yang saya hormati.

Pak Sekjen dan semua Eselon I yang saya hormati.

Rekan-rekan yang berbahagia.

Saya melihat secara global daripada perencanaan untuk program-program. Pada dasarnya semua ini bisa kita terima dalam konteks sapinya sudah bagus, tapi saya kok belum melihat sesuatu terobosan yang besar dalam konteks yang diinginkan oleh pemerintahan Pak Jokowi 10 juta lapangan pekerjaan. Artinya kalau 10 juta lapangan pekerjaan kita

berbicara 2 juta pertahun, nggak gampang loh 2 juta pertahun itu kita berbicara lowongan kerja baru bukan yang ada. Jadi oleh karena itu saya ingin tahu ini dimasukkan dimana ini program penciptaan 10 juta lapangan kerja. Kami pernah melakukan itu, dulu 1 juta di Jawa Barat, sekarang kita ingin tahu kira-kira 2 juta sanggup nggak dan dimana karena disitu nanti akan menyangkut juga misalnya bazar, expo, job fair expo, kemudian informasi website, SMS lowongan pekerjaan, ini menjadi penting, saya nggak tahu nanti ditempatkannya dimana karena program ini semua masih global dan bagaimana kita melakukan suatu fungsi pengawasan jika kita tidak tahu *breakdown* detail paling tidak.

Yang kedua, kalau kita sudah bicara lowongan maka kita bicara pelatihan. Jumlah tenaga kerja kita saat ini angkatan kerja itu hampir 121 juta, nah kita ingin mengejar bonus demografi, artinya adalah ada angkatan kerja yang berpendidikan, terampil, mampu ini kita berbicara tentang pelatihan. Nah konteks pelatihan disini memang saya tidak tahu apakah itu masuknya di Binapenta atau di Binalttas dengan anggaran yang cukup besar. Artinya sebagaimana disampaikan teman-teman ini menjadi penting BLK ini, saat ini BLK-BLK yang ada di daerah itu umumnya hanya seonggok gedung dengan peralatan yang ibaratnya kalau sekarang orang sudah pakai motor Ninja dia masih pakai CB yang tahun 80, nah berarti inikan harus ada penambahan dan dimana? Jadi dimana ini tentu kita berharap pembuatan BLK baru ini adalah di daerah yang memang merupakan supplier daripada tenaga kerja jadi bisa bekerjasama dengan SMK. Saya tidak tahu nanti masuknya dipoin yang mana.

Saya juga ingin tahu nanti Pak Menteri, inikan kita berbicara berikutnya adalah perlindungan pekerja diluar negeri dimana saja, sementara yang saya pahami bahwa Kementerian Tenaga Kerja ini nggak punya orang diluar negeri. Siapa yang mau ngurus? yang mau ngurus nanti pengaduan-pengaduan. Oleh karena itu nanti saya minta dari Dirjen PHI pun ini juga anggarannya harus ditambah ini karena day to day di Komisi IX saja kasus per kasus. Saya mungkin akan rajin sering-sering memanggil Dirjen PHI karena kita ini berbicara tenaga kerja ya berbicara masalah demi masalah, jadi jangan business as usual kita anggaran *copy paste* dari tahun lalu ke tahun berikutnya. Ini saya rasa penting sekali, Pak Dirjen harus punya tim pengacara nanti disana itu ya.

Berikutnya tentu saya menawarkan Pak Menteri saya pikir ini bisa memanfaatkan BPJSTK BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan investasi dana Jamsostek ini nanti untuk membangun rumah-rumah susun bagi buruh dan juga sebetulnya saya inginnya rumah sakit bagi buruh, tapi kalau tidak bisa mungkin Puskesmas atau klinik bagi buruh di daerah-daerah industri yang mana sebetulnya ini sudah dilakukan kalau nggak salah oleh Pak Menteri ya tapi baru satu, ini masih banyak daerah-daerah industri agar mengurangi cost beban hidup buruh. Kan cost buruh itu antara lain perumahan, kesehatan, mungkin juga belanja-belanja Sembako dan sebagainya. Nah ini yang mungkin bisa kita tekan dengan cara melakukan program tersebut.

Jadi saya mohon nanti artinya dengan anggaran yang sebegini besar kawan-kawan nanti apabila ada waktunya mungkin per Eselon per

Dirjen kita matangkan sehingga target Nawacita yang 10 juta lapangan kerja dan melindungi tenaga kerja kita itu bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu Pak Menteri, terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Dede.

Sembilan orang telah menyampaikan pandangan, masukan dan lain sebagainya. Sekarang kami persilakan kepada Pak Menteri untuk menyampaikan respon, kami persilakan.

F-PD (Drs. H. ZULFIKAR ACHMAD)

Ketua, mau penajaman ketua.

KETUA RAPAT :

Ya Pak Zulfikar.

F-PD (Drs. H. ZULFIKAR ACHMAD) :

Saya menambahkan dari ketua tadi masalah BLK.

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati Ketua dan Wakil Ketua.

Para rekan-rekan Komisi IX.

Adinda Menteri beserta staf yang saya hormati dan saya banggakan..

Ini yang saya sampaikan ini hanya mengingatkan saja bahwa pengalaman saya di daerah yang selalu dituntut masyarakat kepada saya saat memimpin Kabupaten Bungo dua periode yaitu lapangan kerja. Karena apa? Ada visi misi saya bahwa saya akan ciptakan lapangan kerja segala macam itu, ternyata itu hanya berapa persen saja. Jadi saya tertarik dengan BLK yang ada di daerah saya itu, itu kalau nggak salah sudah seumur saya juga itu dari mulai pertama kabupaten itu dibentuk sudah ada itu, mesinnya mesin saya lihat ada mesin dompen dari Cina itu, gampang belinya gampang rusak. Mesin-mesin jahit juga sudah karatan. Ini sangat penting sekali.

Jadi pengalaman kami selama dua periode itu banyak investor yang masuk ke kabupaten saya itu waktu saya menjabat Bupati minta supir apa yang dibidang Pak Menteri tadi traktor, ... itu sangat sulit, akhirnya apa? Bawa dari Jawa dan dari mana-mana untuk menjadi supir, karena apa? Karena tidak ada juga pelatihannya, ini sangat penting sekali bahwa yang gampang-gampang sajalah yang tamat SD dan SMP itu yang paling banyak itu, banyak putus sekolah dan itu juga yang banyak

melakukan minuman Miras oplosan itu, air tuak itu yang dipendam-pendamin itu. Jadi ini sangat ini sekali di daerah.

Kabupaten pemekaran dari sebelah saya itukan belum punya BLK-nya, nah ini Kabupaten Tebo, Kabupaten Merangin itu belum ada itu yang bertetangga dengan saya itu. Nah ini perlu supaya diadakan itu. Juga tenaga wanita itu pernah meminta kepada saya minta ijin untuk kerja di Arab ke Malaysia ini saya larang, nggak boleh, mana yang belum punya istri cari laki cepat, biar lakinya kerja gitu. Dulu pertama kali saya menjabat bupati tidak ada provinsi Jambi itu yang menerima minta untuk menjadi Pegawai Negeri, tapi saya ketemu dengan menteri negara, dengan BKN dan didukung oleh Menteri Tenaga Kerja waktu itu, akhirnya dapat dua kali saya menerima untuk pegawai negeri. Belakang ini sudah ditarik ke pusat, makanya tenaga kerja yang ada disitu banyak tenaga kontrak daerah, kalau guru itu dari komite gajinya itu banyak sekali itu yang belum dijadikan pegawai negeri. Kalau bisa ini kalau tenaga PNS yang baru diterima yang belum pernah mengabdikan kepada negara dan bangsa ini okelah kita nggak ini, tapi orang-orang yang sudah bertahun-tahun menjadi tenaga honor baik honor daerah maupun komite kalau bisa ini juga diangkatlah sebab kemampuan daerah itu, saya dulu pertama saya kasih 800 ribu per bulan.

KETUA RAPAT :

Pak Zul, kalau bisa fokus ke anggaran bukan pengawasan.

F-PD (Drs. H. ZULFIKAR ACHMAD) :

Nggak ini ke anggaran supaya duitnya disiapin, kalau nggak ada cerita ini kan duitnya mau dianggarkan, betul nggak dik menteri? Nah itu Ketua, jadi cerita dulu baru duitnya kan gitu. Tenaga kerja kan tambahannya disitu nanti akan timbul kesehatannya segala macam.

Saya rasa itu tambahan dari saya, jadi anggaran itu buru-buru tambah lagi anggaran yang sebanyak-banyaknya itu supaya gampang. Kalau ada yang sakit tenaga kerja keluarkan itu duit, duit rakyat untuk rakyat, cocok nggak? Saya dulu begitu, ada duit nggak? ada APBD nggak ini, kalau nggak ada bagaimana PAD kita tingkatkan, kita naikkan. Dari 4,3 miliar saya pegang menjadi 2 triliun, 100 miliar dapat lebih waktu saya menjabat menjadi Bupati kan gitu.

Saya rasa itu Pak Menteri. Selamat bekerja, saya tadi berbisik dengan adik saya ini, "dik coba pakai jas, pakai dasi dik, saya mau tahu itu, Dirjen kan pakai dasi nggak apa-apa, saya pikir sama dengan tenaga kerja mau demo. Sebab wibawa dengan jabatan itu harus seimbang dia, ada wibawa ada jabatan, ada jabatan ada wibawa.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Jadi lain kali Pak Menteri kalau datang pakai dasi gitu ya. Baik saya kira tidak ada lagi, saya persilakan Pak Menteri untuk merespon beberapa masukan dari anggota.

MENAKER RI :

Terima kasih pimpinan dan segenap Anggota Komisi IX yang saya hormati.

Ijinkan saya menjawab secara umum dari beberapa pertanyaan para anggota dewan yang terhormat tadi dan mohon ijin juga nanti saya ingin memberikan kesempatan melalui pimpinan kepada jajaran Eselon I kami, mungkin yang beberapa isu yang bisa disampaikan kepada bapak dan ibu sekalian untuk merespon pertanyaan maupun masukan yang ada.

Pertama ini terkait dengan soal percepatan sertifikasi profesi hubungannya dengan tenaga kerja asing dari Ibu Okky. Itu bahwa sebenarnya salah satu kunci didalam sertifikasi profesi itu namanya MRA (Mutual Recognition Arrangement) yang pada intinya bahwa standar dari satu negara yang ini diharmonisasikan dengan standar dinegara lain dan diakui. Jadi ini harus ada bilateral ... antar negara Indonesia dengan negara lain terkait dengan standarisasi kompetensi dan sertifikasi dari sektor-sektor pekerjaan tertentu setidaknya mencakup 12 sektor yang akan dipertarungkan di MEA 2015.

Ini memang masih ada PR untuk sejumlah sektor yang kita sudah mendorong Kementerian teknis berikut sektornya untuk segera melakukan percepatan baik untuk proses sertifikasinya maupun untuk MRA nya. Sektor itu misalnya sektor TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi), sektor pariwisata maksudnya itu. Jadi kalau urusan sertifikasi profesi inikan besarnya ada di BNSP melalui LSP atau lembaga sertifikasi profesi tetapi untuk mendorong standarisasi kompetensinya itu memang harus ada dorongan yang lebih proaktif dari sektor. Jadi sektor itu misalnya kalau di kesehatan ya mereka-mereka para pelaku di sektor kesehatan itu yang mereka harus segera mendorong agar ada standarnya. Nah standar itu yang kemudian pada akhirnya berdasarkan masukan ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, tetapi modelnya ini jemput bola itu kaitannya dengan standarisasi kompetensi ya nanti dari sana ketika standarnya sudah ada lembaga sertifikasi profesinya dibentuk oleh asosiasi dari sektor. Jadi asosiasinya ngebentuk nah itu tentu nanti dengan BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi).

Nah ini saya perkenalkan Pak Sumarna, ini Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang mengurus soal itu, nanti beliau yang akan memberikan pedoman bagaimana pembentukan lembaga sertifikasi profesi untuk masing-masing sektor. Jadi kuncinya di MRA itu.

Nah sebagai contoh Insinyur misalnya itu MRA nya sudah ada, jadi artinya kalau kita bilang Insinyur ini tersertifikasi di Indonesia berarti begitu kita kirim ke negara lain itu sudah oke karena sudah ada Mutual Recognition Arrangement, kalau belum ada ini problem karena disini kita bilang oke begitu masuk negara lain nggak oke atau sebaliknya. Nah itu kenapa didalam MEA 2015 mempersyaratkan adanya Mutual Recognition Arrangement.

Yang kedua terkait dengan perlindungan tenaga kerja lokal, nah tentu ini menjadi kepentingan kita sebagai sebuah bangsa. Namun dalam konteks globalisasi tenaga kerja sekarang ini bahasa publiknya mungkin kita agak sulit untuk mengatakan bahwa kita melakukan proteksi terhadap tenaga kerja kita tetapi secara substansi ada kebutuhan besar bagi kita untuk melakukan proteksi semacam itu.

Nah oleh karena itu kita mendorong sejumlah regulasi yang terkait dengan pengendalian tenaga kerja asing itu baik melalui persyaratan-persyaratan yang diberikan termasuk sertifikasi profesinya. Jadi kalau orang mau mengurus IMTA (Ijin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing) salah satu syaratnya adalah tenaga kerja asing yang mau dimasukkan itu dia harus melampirkan sertifikat kompetensinya. Jadi ini memang sudah menjadi regulasi, ini yang terus kita tambahkan dengan regulasi yang baru termasuk nanti adalah sertifikat bahasa. Ini kita sudah kerjasama dengan badan bahasa di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menangani soal itu agar kita punya standar mengenai bahasa Indonesia semacam *toefl* yang nantinya akan ada kewajiban bagi tenaga kerja asing untuk menguasai bahasa Indonesia melalui uji bahasa Indonesia yang standarnya kita serahkan kepada badan bahasa di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

F-PP (Dra. HJ. OKKY ASOKAWATI, M.Si) :

Pimpinan.

Ya terima kasih Pak Menteri.

Di Undang-undang 13 itukan dikatakan kalau tenaga kerja asing itu kan perlu melakukan *transfer of knowledge* ya, nah dengan adanya MEA ini apakah pasal itu masih berlaku. Artinya, tenaga kerja asing ini selama dia belum tersertifikasi dia tidak boleh bekerja dulu dan ketika dia bekerja disini apakah dia bekerja atau hanya *transfer of knowledge* begitu?

MENAKER RI :

Ijin ketua.

Jadi *transfer of knowledge* itu sudah menjadi regulasi kita dan sekarang ini kita perketat lagi. Jadi satu orang tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia bekerja disektor tertentu untuk jabatan tertentu dia diwajibkan untuk memiliki pendamping dari tenaga kerja Indonesia disini, jumlahnya dua orang. Nah pada pada waktu saya masuk saya mencoba menggali persoalan yang muncul disitu, apakah pendamping ini benar-benar ada atautkah hanya sekedar nama, katakanlah misalnya ini TKA nya namanya si A lalu disebut pendampingnya BC ini orang Indonesia katakanlah begitu, tetapi pertanyaannya bagaimana untuk memastikan bahwa B dan C ini benar-benar bekerja mendampingi dari si A yang tenaga kerja asing sehingga terjadi *transfer of knowledge, transfer of skill*, nah belum ada regulasinya, kemarin hanya mewajibkan begitu saja, cuma secara teknis saya melihat ada bolong-bolong, kalau hanya sekedar diwajibkan nanti kejadiannya katakanlah kita sewa dua orang

Indonesia dibayar terus kemudian nanti namanya saya jadikan pendamping untuk tenaga kerja asing saya ya, kan itu bisa saja kesitu. Katakanlah Michael didampingi oleh Abdul sama Markonah misalnya dua orang, nah itu kan bisa saja. tapi sebenarnya Abdul sama Markonahnya ini nggak bekerja, dia hanya dipakai namanya dibayar saja.

Nah oleh karena itu saya buat pengetatan disana bahwa harus ada kontrak kerja juga, jadi katakanlah kalau seorang tenaga kerja asing dia bekerja disebuah perusahaan nah pendampingnya yang dari Indonesia juga harus ada kontrak dengan perusahaan itu. Nah dengan demikian kan ada kepastian bahwa pendamping kita itu benar-benar bekerja pada perusahaan yang sama dengan tenaga kerja asing yang bukan hanya sekedar namanya dipakai. Nah itu salah satu cara kita untuk memastikan adanya transfer of knowledge sebagaimana yang diminta oleh Undang-undang.

Bapak dan ibu, hadirin sekalian.

Yang berikutnya soal anggaran kalau ditambah ini lebih bagus. Nah tentu kita juga punya pandangan yang sama bahwa memang ada kebutuhan yang besar untuk soal itu, tetapi ada dua pertimbangan penting yang hari ini kami masih terus untuk menuntaskan Renstra dari kami dan sekaligus *roadmap* kami untuk sampai 2019. Nah diperencanaan besarnya tentu ada kebutuhan-kebutuhan yang lebih besar terkait dengan peningkatan kinerja dari Kementerian Ketenagakerjaan yang langsung berorientasi pada kepentingan rakyat termasuk salah satunya mengenai soal balai latihan kerja itu.

Nah oleh karena itulah kami kemudian belum mengajukan tambahan anggaran untuk tahun ini. Disamping sebagaimana tadi kami sampaikan diawal bahwa kami juga sedang mempersiapkan sumber daya manusia yang ada di Kementerian agar ini *ready for run* dulu kira-kira begitu lah baru kemudian yang lain-lainnya menyusul. Nah kami khawatir kalau misalnya langsung besar kami sendiri juga baru terus kemudian ini tim barulah ibaratnya begitu nanti agak keteteran, nah sementara jika Pak Ali agar bisa mendapatkan WTP ini juga menjadi cita-cita kami sehingga kita coba ini kelolah yang ada dulu sambil mematangkan perencanaan kedepan.

Dalam perencanaan kedepan ini memang kalau teman-teman berkenan ini harus disosialisasikan kesejumlah pihak baik itu di DPR sendiri kaitannya dengan komisi lain maupun di pemerintahan instansi yang lain seperti misalnya Bappenas Kementerian Keuangan dan juga Kemudian Pendidikan. Kaitannya dengan apa, investasi SDM itu belum menjadi primadona didalam politik anggaran kita. Nah padahal kedepan ketika kita ingin melakukan percepatan pembagunan investasi SDM itu menjadi salah satu kuncinya baik itu bentuknya melalui penguatan balai latihan kerja, melalui upaya untuk meningkatkan jumlah keluaran dari mereka yang dilatih terutama mereka yang menganggur, mereka-mereka yang selama ini belum mendapat akses dipelatihan kerja di pemerintah maupun diswasta ya ini semua harus di-treatment.

Betul bahwa BLK kita tadi ada sepeda motor tahun 80, TV nya hitam putih terutama yang mirip ... ini masih ada, nah padahal dalam

skema pengembangan BLK kita sebenarnya untuk UPTP BLK yang dimiliki oleh pemerintah pusat inikan dijadikan sebagai semacam *center of excelent*, ya ini kayak *rule model* –nya pengembangan balai latihan kerja dan pelatihan berbasis kompetensi, ini yang kita kembangkan. Nah untuk UPTD BLK-BLK yang dimiliki oleh pemerintah daerah ini kita kembangkan sebagai *center of development*, jadi dia menjadi pusat dari pemberdayaan, pelatihan-pelatihan kerja yang ada di daerah yang juga dilakukan oleh masyarakat misalnya lembaga pelatihan kerja dan lain sebagainya. Nah polanya sebenarnya seperti itu, investasi untuk itu secara kasar saja saya pernah ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman tapi ini... kita mungkin bisa butuh 15 triliun lebih untuk melakukan penguatan ini. Nah otomatis inikan harus di desain secara baik dan juga membutuhkan komitmen dari semua pihak baik di pemerintah maupun di DPR untuk memastikan bahwa investasi SDM itu hal yang sangat penting dan perlu menjadi prioritas dari bangsa ini secara keseluruhan.

Nah karena selama ini ambil contoh ketika kita berbicara mengenai alokasi dana pendidikan karena dulu kebetulan saya pernah juga di Komisi X itu alokasi dana pendidikan kan masih saja selama ini lebih banyak ke sektor pendidikan formalnya, nah tapi pendidikan non formal terutama yang berbentuk pelatihan kerja ini kan belum banyak disentuh melalui skema alokasi anggaran itu.

Jadi artinya kalau bapak dan ibu sekalian memiliki konsern yang sama dengan kami dalam soal itu tentu seluruh stake holder baik di DPR maupun di pemerintah bisa kita dorong untuk sama-sama menegaskan politik anggaran kita yang benar-benar berpihak kepada investasi SDM dimasa-masa yang akan datang dengan segala bentuknya.

Yang berikutnya soal pekerja anak, bahwa pekerja anak nanti Pak Dirjen PPK nanti biar juga menjelaskan. Terus ijin Merpati nanti Pak Irianto menjelaskan.

Imam Suroso soal penyerapan anggaran tahun lalu yang rendah, betul bahwa di Binwas Naker kemarin sekitar 71%, yang lain sedikit lebih tinggi ya tapi sebenarnya ini juga cerita soal kenapa penyerapannya agak rendah itu sebenarnya ahli-ahli yang ada di Komisi IX ini yang lebih paham terutama yang lama nah itu yang lebih paham ... persoalannya tetapi sepertinya kalau yang kita pahami bahwa ini salah satunya karena keterlambatan didalam proses baik itu persetujuan maupun pencairan anggaran itu sehingga sampai dengan bulan April baru disahkan terus Juli kira-kira baru cair sehingga waktunya praktis hanya tersisa 6 bulan. Nah oleh karena itulah mumpung ini masih awal Februari nah mohon dukungan dan bantuan dari teman-teman Komisi IX kita gencet agar bulan ini juga bisa selesai semuanya sebelum teman-teman Reses, kalau ini bisa semuanya sehingga lain-lainnya juga bisa lebih cepat. Nah kalau ... yang tadi disampaikan Dapil dan lain sebagainya saya tidak perlu menjawab secara spesifik, saya hanya ingin menjawab bahwa saya ini juga pernah menjadi Anggota DPR jadi ku tahu yang kau mau.

Bapak dan ibu sekalian yang saya hormati.

Kemudian soal dari Pak Budi, silakan nanti kalau misalnya diperlukan untuk pendalaman tentu sebagaimana kelazimannya Raker

kemudian RDP terus Raker lagi. Tapi kalau boleh saya mengajukan permohonan saya dengan DPR Reses pada bulan ini juga dipertengahan, akan sangat membantu tidak secara keseluruhan kalau pembahasannya itu bisa diselesaikan sebelum Reses. Terima kasih Pak Djoni.

Bapak dan Ibu, Hadirin sekalian yang saya hormati.

Kemudian beberapa masukan soal BLK dari Ibu Amelia oke kita ..., kemudian dari Pak Djoni soal perlindungan tenaga kerja. Nanti detailnya Ibu Rena Dirjen Penempatan dan Perlindungan biar jelaskan, tapi kalau ditanya kaitannya dengan BNP itu gini, posisi Kementerian Ketenagakerjaan itu regulator. Pertanyaannya adalah siapa operatornya? Kalau berdasarkan Undang-undang 39 dan PP 81 mengenai BNP2TKI bahwa Kemenaker menjadi regulator dan kemudian operatornya itu adalah swasta apabila skema penempatan tenaga kerja Indonesia keluar negeri itu P to P atau *private to private* berarti Naker menjadi regulator, operatornya swasta kalau skemanya P to P. Naker menjadi regulator, operatornya adalah BNP2TKI apabila skema kerjasamanya adalah G to G. Nah selama ini sebenarnya kalau kita lihat yang G to G itu praktis sebenarnya hanya Korea, cuma karena kecanggihan yang selama ini sudah berlangsung jadi akhirnya jadi kemana-mana juga. Jadi posisinya adalah seperti itu.

Nah Kemenlu gimana? Kemenlu itu dilindunginya, nah perlindungan itu memang boleh dibilang *full* menjadi kewenangannya dari Kementerian Luar Negeri melalui perwakilan luar negeri termasuk anggarannya walaupun di Kemenlu sendiri itu juga setiap saat ngeluh juga soal anggaran perlindungan itu. Jadi memang kalau kita lihat untuk perlindungan ini baik di Naker maupun di Kementerian Luar Negeri ini juga masih menghadapi problem terkait dengan soal anggaran itu terutama di Kemenlu untuk wilayah dilindunginya. Nah kalau kami lebih terkait dengan soal regulasi yang terkait dengan perlindungan itu yang ini terus menerus kita tingkatkan.

Kemudian soal Dapil, Pak Charles juga aspirasi tadi sudah saya jawab. Dan Pak Teuku Khaidir ini terima kasih juga masukannya betul. Saya kira dua sektor soal agrobisnis sama maritim ini penting kita kembangkan. Nah ini sekali lagi ini terkait dengan ... mengenai investasi SDM tadi didepan saya sampaikan. Agro bisnis sektor pertanian dan sektor maritim itu menjadi penting, sangat amat penting kenapa? karena kalau kita lihat dari struktur angkatan kerja kita sekitar 121 juta angkatan kerja itu 114 juta diantaranya sudah bekerja dengan berbagai kategori, 7,2 juta nya ini pengangguran itu yang 7,2 masih banyak yang hanya sekedar lulus SMP, sementara untuk masuk BLK saja baik yang BLK berbasis industri ini masih dipersyaratkan lulusan SMA. Nah pertanyaan siapa yang mau urusin orang yang hanya lulus SD atau lulus SMP atau orang yang nggak lulus SMA? Nah inikan menjadi masalah.

Oleh karena itu pengembangan pertanian dan pengembangan sektor maritim ini justru menjadi penting karena dua sektor ini sangat mungkin untuk mengakomodir pengangguran terbuka dengan kategori yang katakanlah *low skill* itu. Nah disini investasi untuk sektor pertanian dan maritim itu besar. Kami memang ada rencana dari program

revitalisasi BLK itu nantinya juga ingin mentransformasikan sejumlah BLK dikawasan tertentu yang relevan itu menjadi BLK maritim demi untuk merespon kerja besar dari pemerintahan Jokowi JK di sektor kemaritiman dan sekaligus karena kita memang melihat bahwa potensi di daerah itu terkait dengan soal kemaritiman juga termasuk besar dan selama ini belum banyak disentuh. Nah kita mencoba rintis dulu walaupun anggarannya belum besar tapi rintisannya ada sehingga nanti kedepan mungkin bisa di-*support* dengan anggaran yang lebih besar.

Terus kemudian soal WTP, ini Pak Ali terima kasih. Sekali lagi cita-cita kami ingin WTP dan dulu-dulu seringkali yang menjadi problem soal laporan keuangannya itu aset, dimana-mana itu hampir semua Kementerian rata-rata soal aset. Nah aset kalau di Kemenakertrans itu memang yang paling rumit itu aset di Trans kaitannya dengan tanah dan segala macam. Mudah-mudahan ketika Transnya sudah tidak disini kita bisa lebih perform dari segi laporan keuangannya.

Dari Pak Dede Yusuf, ini soal 10 juta lapangan pekerjaan, logikanya berarti 2 juta pertahun tetapi dalam pembagian tugas dan fungsi serta kewenangan kaitannya dengan perluasan kesempatan kerja ini di Indonesia itu tidak menjadi monopoli Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi kami hanya berkontribusi terhadap pengisian sebagian dari lapangan pekerjaan itu. Nah yang lain itu menjadi tugas dan fungsi dari Kementerian teknis yang lain, sebagai contoh Kementerian Pariwisata walaupun saya belum dikasih datanya tapi saya sempat menyampaikan soal ini bagaimana 10 juta ini dibagi kira-kira, itu Kementerian Pariwisata sampai dengan 5 tahun yang akan datang sebagai contoh mereka mentargetkan ada perluasan kesempatan kerja sekitar 4 juta untuk khusus di Kementerian Pariwisata karena dengan peningkatan dari Wisman maupun yang lokal. Nah jadi sisanya yang lain itu ada di Kementerian Perhubungan karena pembangunan infrastruktur dengan dana yang cukup besar.

Nah disini kami hendak menegaskan peran dari Kementerian Ketenagakerjaan ini dalam mengisi penyediaan lapangan kerja itu sesuai dengan alokasi anggaran yang diberikan oleh Kementerian Keuangan maupun ...

F-PD (DEDE YUSUF M.E., ST, M.I.Pol) :

Interupsi sedikit ya Pak Menteri.

Jadi maksudnya adalah bukannya Ketenagakerjaan ini mengisi 10 juta karena pasti tidak mungkin tetapi ketika kita berbicara peluang lowongan kerja kalau bisa itu nanti *by name by addres*. Jadi konteksnya begini, misalnya Kementerian PU ingin menggarap sekian ratus kilometer jalan tol, diperlukan 1.200 tukang batu, diperlukan operator ini sekian ribu. Nah nanti dari Kemenaker ini mem-*publish* kepada publik sehingga masyarakat itu nanti tahu, oh kalau begitu karena saya tukang las berarti ini lagi membutuhkan lowongan. Permasalahan kita ini bukannya tidak ada lowongan kerja, tapi nggak tahu nyarinya kemana. Nah ini yang saya harapkan mungkin dari Kemenaker nanti membuat itu tadi

KASET 5 TIDAK BISA DI-REWIND / KASET RUSAK

MENAKER RI :
KETUA RAPAT :
MENAKER RI :
KETUA RAPAT :
MENAKER RI :
KETUA RAPAT :
F-PDIP (ABIDIN FIKRI, S.H.) :
F-PG (BUDI SUPRIYANTO, S.H., M.H.) :
F-PG (ADITYA ANUGRAH MOHA, S.Ked) :
KETUA RAPAT :
F-P.HANURA (CAPT. H. DJONI ROLINDRAWAN, SE, MMAR, MBA) :

F-PG (Hj. DEWI ASMARA, S.H) :

.....menjadi ada juga yang kemudian bingung ini mengatakan ada tambahan. Nah APBNP itu sesungguhnya adalah pagu yang ketika itu sudah ditetapkan nanti bisa ditambahkan di APBNP, sedangkan yang kita maksud sekarang mana sebetulnya apakah betul-betul kinerja dari Kementerian Naker sekarang ini tidak ada perubahan sama sekali dari yang lalu. Kan kita lihat ada, apa benar-benar sudah cukup sedemikian saja? karena yang kami lihat dalam perjalanannya dikomisi yang lain pun itu dimungkinkan, artinya itulah yang namanya APBNP karena kalau kita hanya melihat seperti ini yang dimaksudkan dengan Pak Budi tadi itu tidak merefleksikan satu, tambahan anggaran yang betul-betul dibutuhkan sesuai dengan program yang akan dijalankan oleh Pak Menteri sekarang ini. Tapi masih meneruskan mungkin dari yang lalu dimana usulannya sudah masuk mungkin sebelum Pak Menteri ada. Jadi ini yang kami tanyakan sesungguhnya, ini usulan dari menteri yang lama dan ketika itu karena *baseline* mungkin hanya pokok-pokoknya saja. Sehingga kami juga dalam pendalaman memang akan menanyakan program-program sehubungan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Saudara Aditya Moha karena kami tahu juga bahwa sesuai dengan Undang-undang MD3 tadi dan sumpah jabatan kami ada beberapa program yang kemudian menghilang. Nah in tentu perlu pendalaman kenapa hilang, apakah memang program-program ini kemudian tidak menjadi program dari Pak Menteri yang sekarang atau bagaimana? jadi dulu memang APBN itu dibuat space untuk memberikan kesempatan bagi kabinet baru untuk mengajukan program dan mengajukan anggarannya. Jadi kalau kita hanya berbicara seperti ini benar yang disampaikan Pak Budi ini sebenarnya bukan yang baru, bukan penambahan tetapi itu sudah diajukan hanya namanya saja penambahan oleh karena ada program yang benar-benar baru.

KETUA RAPAT :

Ya memang betul bahwa APBN 2015 kemarin itu sifatnya ... dengan perubahan itu, oleh karena itu mungkin pak Menteri tanpa merubah kesimpulan tadi apakah ada penjelasan soal ini.

Kami persilakan.

MENAKER RI :

Terima kasih.

Pertama bahwa soal anggaran tambahan inikan karena memang pada faktanya dari baseline yang dari tahun sebelumnya kemudian ketahun ini kita akan mendapatkan tambahan dari Kementerian Keuangan jadi itu jelas sebetulnya ya tambahan. Jadi artinya tambahan itu membutuhkan persetujuan dari Dewan, itulah kenapa kemudian kita membahas ini, itu satu.

Yang kedua kalau ditanya apakah tidak ada kebutuhan yang lain? Didepan tadi sudah saya sampaikan kalau bicara soal kebutuhan besar sekali. Itulah kenapa kami hendak mematangkan roadmap satu, yang kedua kami mempersiapkan SDM di internal kami. Karena kami sadar betul bahwa kalau kami tidak siapkan ini terus kemudian kami diberi anggaran yang besar misalnya itu nanti justru malah kedodoran. Yang kedua juga untuk menghindari agar program-program tahunan itu tidak berhenti disatu tahun anggaran. Ambil contoh pembangunan BLK misalnya, bangun BLK satu tahun kemudian dua tahun kemudian baru isi alat, dua tahun kemudian baru latih orang terus apa gunanya? Nah kami nggak mau begitu, kami maunya kalau misalnya ditanya misalnya soal apa yang menjadi pikiran kami kurang lebih, kami ingin bahwa dari segi *baseline* untuk peningkatan investasi SDM itu jelas sampai dengan 2019.

Jadi sudah *clear*, karena kalau misalnya tidak katakanlah hari ini misalnya kami ditambah 1 triliun besok misalnya berapa triliun, besok lagi misalnya naik tapi plukkuatif begitu, itu kami terus terang tidak cukup punya keyakinan bahwa *output*-nya akan baik. Nah tetapi kalau kami punya peningkatan terhadap baseline anggaran itu baik itu yang didorong oleh DPR maupun di pemerintah, itu akan membantu kita meningkatkan output dari tenaga kerja itu. Itu kenapa tadi sempat saya singgung bahwa kalau soal BLK kita kalau kita buat roadmap kita ini 15 triliunan, boleh jadi malah kurang. Nah cuma kita inginnya bahwa katakanlah perencanaannya nanti 2016 dan seterusnya itu *baseline*-nya menjadi lebih jelas. Itu sebenarnya pikiran kami Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Cukup ya?

Masih ada Pak Budi.

F-PG (BUDI SUPRIYANTO, S.H., M.H.) :

Sekali lagi, sebenarnya tidak ada masalah.

Jadi permasalahannya begini saja, jadi barangkali kesimpulan nomor satu coba ditayangkan lagi, coba tampilkan. Jadi cukup begini saja pimpinan, Komisi IX DPR RI menerima penyampaian anggaran 2015. Dan kemudian yang kedua ada pendalaman dengan Eselon I, jadi jangan ada kata-kata tambahan, nanti bias. Ini saya ingatkan ya, dulu waktu pembahasan APBN 2015 itu pagunya memang 4 triliun, kemudian ada penambahan sekitar 500 anggaran lebih sehingga menjadi 5, lah 5 itu

kemudian kita setuju kemudian di dok menjadi Undang-undang APBN 2015 sebelum masa kerja DPR periode 2009-2014 habis, itu ceritanya seperti itu, karena kalau sekarang bilang ada penambahan Banggar juga nggak tahu darimana kemudian begitu ada penambahan seharusnya kita bahas bareng lagi. Nah ini tidak ada penambahan sebetulnya, itu APBN 2015 yang kita ketok September 2014 jumlahnya 5 triliun lebih itu sebenarnya seperti itu, seingat kami seperti itu. Nah sekarang tidak ada penambahan seperti tadi makanya Pak Menteri tidak mengajukan penambahan di APBNP ini, dan itu sudah benar, nggak ada masalah kan? Cuma yang kita masalahkan kan kesimpulannya jangan salah seolah-olah APBNP Kementerian Tenaga Kerja dapat tambahan anggaran itu salah. Makanya disinikan bunyinya surat Menteri Keuangan Nomor S642/MK 02/2014 tanggal 24 September 2014, kalau bicara ada tambahan 500 juta mestinya surat Menteri Keuangan ini 2015 ini.

MENAKER RI :

Jadi surat Menteri Keuangan Nomor S876 dan seterusnya tanggal 24 Desember 2014 tentang alokasi tambahan anggaran RAPBN 2015.

F-PKS (H. ANSORY SIREGAR, Lc.) :

Sebentar, Pak Budi saya yang bacanya salah.

MENAKER RI :

Ini sebentar, saya ijin dulu boleh kebelakang ini urusan mendesak ini.

F-PKS (H. ANSORY SIREGAR, Lc.) :

Nggak apa-apa walaupun Pak Menteri nggak ini saya kira tadi mungkin Pak Budi ada sedikit kekeliruan ya. Kekeliruannya gini, 5,2 triliun sebelumnya kemudian dibelah duren itukan Kementerian Tenaga Kerja 3,7 bukan 4,2 makanya 3,7 ditambah 5 ini menjadi 4,2 makanya nggak ada tambahan, nggak ada tambahan. ... bukan menerima kita disini, jangan dulu menerima tapi mengapresiasi sudah bagus.

F-PG (BUDI SUPRIYANTO, S.H., M.H.) :

Menerima penyampaian, jadi bukan menerima ini

F-PKS (H. ANSORY SIREGAR, Lc.) :

Tapi antara menerima dan menyetujui sedikitnya itu.

F-PG (BUDI SUPRIYANTO, S.H., M.H.) :

Menerima dan menyetujui beda pak, ini kata-kata hukum menerima dan menyetujui beda.

F-PKS (H. ANSORY SIREGAR, Lc.) :

Yang pertama tadi sudah bagus saya lihat, begitu nanti dengan Eselon I baru setelah itu nanti dengan Menteri lagi baru kita ketok gitu.
Terima kasih.

F-P.GERINDRA (ROBERTH ROUW) :

Ya Ketua, saya kira apresiasi saja, jangan menerima, menerima ini nanti konotasinya bisa orang pikir kita sudah terima itu, kita menyetujui itu barang. Apresiasi saja ketua.

KETUA RAPAT :

Ya, jadi saya kira anggaran Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam APBN 2015 itu Rp. 5,251 triliun. Khusus Kementerian Tenaga Kerja tok minus Transmigrasi Rp. 3,7 triliun.

F-PG (BUDI SUPRIYANTO, S.H., M.H.) :

Coba pimpinan, saya hanya merefleksi kesimpulan rapat ya.

Tahun sidang 2014-2015 Masa Persidangan Kesatu, kesimpulan rapat pada tanggal Rabu, 24 Desember 2014.

Kesimpulannya, Komisi IX DPR RI menyetujui perencanaan anggaran Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sebagai baseline RAPBN 2015 sebesar Rp. 5.251.857 dan seterusnya.

Pertanyaannya ini murni ...? murni, tambahannya dimana saya tanya? Ini pak kesimpulan rapat waktu kita 2009-2014 pak, tertanda Pimpinan Ribka Tjiptaning. Jadi ini tidak ada penambahan anggaran, itu saja yang saya maksud. Jadi ini monggo pimpinan, terima kasih ini.

KETUA RAPAT :

Nggak ada yang salah, jadi apa yang Pak Budi bacakan persis sama, ini juga yang tertuang dalam laporan Pak Menteri.

F-PDIP (ABIDIN FIKRI, S.H.) :

Pimpinan, oleh karena itu saya sampaikan diawal harus ada penjelasan kronologisnya agar tidak terkesan langsung ujug-ujug penambahan. APBN murninya itu 5 koma sekian, kemudian karena ada Dirjen dipisah transmigrasinya menjadi 3 koma sekian. Nah menurut Pak Menteri itu 3 koma sekian itu masih kurang sehingga perlu ditambah 500 itu menjadi 4,2. Nah oleh karena itu kalau katakanlah dipisahkan dulu yang itu yang dimaksudkan nah itu kesimpulannya jadi berbeda, harus disebutkan dulu karena anggaran awalnya sekian karena Kementeriannya dipisah lalu anggarannya dipisah. Jadi itu maksud saya pimpinan, agar kita dalam kesimpulannya bisa membaca oh ternyata dulu 5 koma itu adalah ada transmigrasi, kalau nggak ada transmigrasi

jadi 3 koma sekian, nah sekarang menjadi 4,2 oh berarti ada tambahan 500 sekian, gitu loh maksudnya. Saya kira begitu agar jelas saja pimpinan.

KETUA RAPAT :

Jadi tambah satu kesimpulan lagi ya, kesimpulan induk. Jadi kesimpulan induk kita refer saja APBN 2015, Komisi IX DPR RI memahami bahwa anggaran murni Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp.5,251 triliun (anggaran untuk bidang Ketenagakerjaan Rp.3.718.138.585.000 dan anggaran bidang Ketransmigrasian Rp.1.533.718.966.000).

Poin dua, dalam RAPBNP 2015 Kementerian Tenaga kerja mendapatkan anggaran Rp. 4.223.....**(REKAMAN TERPOTONG)**

....??? berarti terdapat penambahan Rp. 505 miliar dibandingkan dengan anggaran APBN 2015.

F-PG (BUDI SUPRIYANTO, S.H., M.H.) :

Dalam RAPBNP 2015 ya toh? Menteri Tenaga Kerja mendapat anggaran Rp. 4 triliun, nggak ada itu pak, darimana?

KETUA RAPAT :

Dalam nota keuangan, ini disampaikan dilaporkan oleh beliau.

F-PG (BUDI SUPRIYANTO, S.H., M.H.) :

Jadi begini Pak Ketua, ini kata-katanya yang perlu diperbaiki. Jadi, ini kan anggaran 2015 ya, anggaran 2015 itu setelah dikurangi transmigrasi.

F-PKS (H. ANSORY SIREGAR, Lc.) :

Pak Budi, melalui Pimpinan, suratnya itu tadi sudah bulan Desember kan bukan September. Jadi tetap anggaran tambahan 500, sudah benar Pak Menteri ini.

F-PG (BUDI SUPRIYANTO, S.H., M.H.) :

Interupsi pimpinan, saya kira dari sini kan sudah kita terlihat bahwa yang dimaksudkan dengan anggaran Rp.4,2 triliun itu karena anggaran awalnya setelah dikurangi dari transmigrasi Rp. 3,7, kita sudah rapat dengan menteri yang lalu juga RDP kemudian sekarang kita rapat lagi. Nah dari rapat kita selalu saja bahkan tadi menteri menyampaikan bahwa perlu peningkatan program-program yang berkaitan dengan kerakyatan di daerah pemilihan berdasarkan Undang-undang MD3 kita juga berkewajiban memperjuangkan itu.

Nah pertanyaan saya apakah yang dimaksudkan dengan penambahan 500 sekian itu sudah masuk dalam bagian yang tak terpisahkan dengan usulan-usulan dari teman-teman? Nah kalau katakanlah itu bisa dimasukkan kenapa? kita perlu juga usulkan untuk ditambah program-program yang berkaitan dengan agar di daerah-daerah lebih banyak lagi BLK-BLK karena tadi disebutkan ketua menyampaikan bahwa ini pengangguran kita 10 juta dan program-program misalkan program padat karya bisa juga kita tingkatkan.

Saya kira itu pimpinan. Apakah katakanlah besarnya harus kita setuju jumlahnya kita penambahan itu 500 atau setelah pendalaman kita tambah lagi. Saya kira begitu pimpinan.

KETUA RAPAT :

Jadi Pak Arifin, ini belum ada persetujuan kita terhadap 505, belum, kita akan setuju setelah diadakan pendalaman di RDP, kita akan Raker lagi, di Raker yang akan datang itulah keluar kata persetujuan atau penolakan, ini hanya menerima penjelasan. Jadi kesimpulan berikutnya tadi kita.

F-P.GERINDRA (Tgk. KHAIDIR) :

Pimpinan, sedikit boleh masukan?

KETUA RAPAT :

Ya silakan.

F-P.GERINDRA (Tgk. KHAIDIR) :

Terima kasih.

Berkenaan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Menteri bahwa selain menjalankan program yang sudah disepakati oleh Menteri sebelumnya, juga ada beberapa terobosan yang mungkin menjadi sesuatu yang berbeda dengan trans sebelumnya, salah satunya tadi Pak Menteri sebutkan bahwa kita juga akan mengupayakan pembukaan BLK-BLK yang berhubungan dengan maritim dan pertanian. Dan itu pak menteri tidak mungkin kita ambil dari angka-angka yang sudah ada dan ini diperlukan daya tambahan untuk kegiatan ini.

Maka oleh karena demikian kami kira kepada Eselon I atau melalui Pak Menteri nanti tolong disampaikan seperti apa sih spesifiknya kegiatan itu dan berapa rupiah yang diperlukan untuk ini.

Kami kira demikian, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Ya nanti kita dalam di rapat dengan Eselon I. Masih ada? Kita kembali ke soal kesimpulan ini, ini belum *clear* betul Pak Budi ini. Ya kalau begitu kita skors beberapa saat ya untuk klarifikasi, skors dulu yang mau sembahyang kita skors kurang lebih 2 kali 15 menit ya.

(RAPAT DISKORS)

Yang saya hormati Pak Menteri.

Skorsing saya cabut kembali.

(SKORS DICABUT)

Kita lanjutkan dengan pembacaan draft kesimpulan. Setelah terjadi diskusi yang mendalam kita lakukan penyempurnaan redaksional terhadap draft kesimpulan. Saya tawarkan dulu kepada Anggota Komisi IX.

1. Komisi IX DPR RI memahami bahwa APBN Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi RI tahun 2015 sebesar Rp. 5.251.857.551.000. Dengan adanya perubahan nomenklatur Kementerian anggaran bidang Ketransmigrasian sebesar Rp. 1.533.718.966.000 dipindahkan ke Kementerian Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI. Sehingga total APBN Kementerian Ketenagakerjaan RI tahun 2015 menjadi sebesar Rp.3.178.138.585.000.
2. Selesai surat Menteri Keuangan Nomor S875-MK.02 Tahun 2014 tanggal 24 Desember 2014, Kementerian Ketenagakerjaan RI mendapatkan alokasi tambahan anggaran RAPBNP 2015 sebesar Rp. 505 miliar. sehingga total RAPBNP tahun 2015 Kementerian Ketenagakerjaan sebesar Rp. 4.223.138.585.000.

F-PDIP (ABIDIN FIKRI, S.H.) :

Sebentar, sebelum dilanjut. Itu kurang total RAPBNP Kementerian Ketenagakerjaan.

KETUA RAPAT :

Ya tolong disempurnakan.

3. Komisi IX DPR RI akan membahas dan memperdalam rincian program dan kegiatan APBNP tahun 2015 Kementerian Ketenagakerjaan dengan para Eselon I dalam waktu segera mungkin.

Silakan ada usul? Cukup? Pak Menteri cukup?

Baik, dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah* tiga kesimpulan ini dapat kita sahkan menjadi kesimpulan Rapat Kerja .

(RAPAT : SETUJU)

Bapak dan ibu sekalian yang saya hormati.

Sebelum kita akhiri Raker ini tentu nanti para Eselon I nanti kita harapkan betul-betul mempersiapkan diri untuk menyampaikan rincian

program dan kegiatan sehingga pada RDP nanti dengan Komisi dapat berjalan dengan cepat dan akan kami segera sampaikan schedule atau jadwal pembahasan antara Komisi IX dengan para Eselon I.

Sebelum kami akhiri kami persilakan Pak Menteri untuk *closing remark*.

MENAKER RI :

Pimpinan dan Anggota Komisi IX yang kami hormati.

Terima kasih banyak atas partisipasi, kerjasama dan dukungan bapak dan ibu sekalian terhadap seluruh proses dari pembahasan RAPBNP 2015 ini. Tentunya kita berharap bahwa kedepan kerjasama ini bisa terus kita tingkatkan sebagai *partner in progress* untuk meningkatkan kualitas Ketenagakerjaan kita secara keseluruhan. Sekali lagi terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah Rapat Kerja antara Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan Komisi IX DPR RI kami nyataka selesai dan kita tutup.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PKL 17.25 WIB)

**Jakarta, Februari 2015
a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,**

Ttd,

**MUHAMMAD YUS IQBAL, SE
NIP. 196707171993031006**